

BAB II

GAMBARAN KASUS KORUPSI JULIARI BATUBARA DI MEDIA DAN PROFIL SINGKAT PDI PERJUANGAN BESERTA PERJALANANNYA DALAM KANCAH POLITIK DAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Bab ini berisi penjelasan lengkap mengenai kasus korupsi Juliari Batubara beserta pemberitaannya, profil PDI Perjuangan, kasus korupsi yang dilakukan PDI Perjuangan, hingga bagaimana pengentasan masalah-masalah dasar di Indonesia yang telah diusahakan oleh kader-kader PDI Perjuangan.

2.1 Kasus Korupsi Juliari Batubara

Kasus korupsi ini berkaitan erat dengan pengadaan bantuan sosial berjenis paket sembako yang merupakan bentuk perlindungan sosial dari Kemensos yang ditujukan untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19 wilayah Jabodetabek. Pihak KPK mengatakan bahwa ada biaya imbalan untuk tiap-tiap paket sembako tersebut senilai Rp10.000 dari Rp300.000. Juliari Batubara yang saat itu berkedudukan sebagai menteri sosial, menetapkan Matheus dan Adi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan bansos tersebut. Tugas mereka ialah menunjuk langsung perusahaan partner, membuat kontrak kerja, dan membuat perjanjian akan adanya “biaya imbalan” yang nantinya harus diserahkan ke Kemensos. Vendor tersebut salah satunya adalah

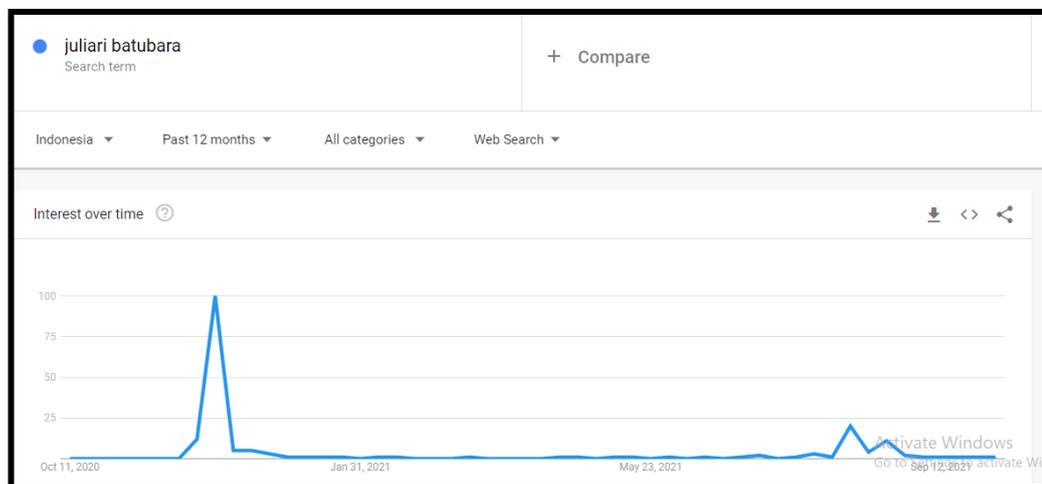
PT Rajawali Parama Indonesia yang diduga sengaja dibuat karena kepentingan proyek bansos ini (Antara, 2020b).

Pada 6 Desember 2020, Juliari menyerahkan diri dan KPK pun langsung menetapkannya sebagai tersangka, setelah sehari sebelumnya Juliari tertangkap pada Operasi Tangkap Tangan KPK. Total biaya imbalan bantuan sosial yang diterima hingga Rp17 miliar, yang terbagi ke dalam dua gelombang. Pada gelombang awal ada Rp12 miliar yang diterima, namun sejumlah Rp8,2 miliar masuk ke dalam kantong Juliari Batubara. Sementara pada gelombang selanjutnya, Juliari dan kawan-kawan menerima Rp8,8 miliar. Uang tersebut disalurkan kepada Juliari dari Matheus melalui perantara Adi. Uang tersebut kabarnya digunakan Juliari Batubara untuk keperluan pribadi seperti untuk menyewa jet pribadi. Pada 23 Agustus 2021, Juliari dijatuhi hukuman 11 tahun penjara atas dasar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Selain hukuman penjara, Juliari juga harus dijatuhi hukuman denda sebesar Rp500 juta dan juga wajib mengembalikan kerugian negara sebesar Rp14,5 miliar. Pada saat persidangan, Juliari sempat meminta untuk dibebaskan dari hukuman, meminta pada Joko Widodo selaku presiden Republik Indonesia, dan juga Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDIP, partai yang menaungi Juliari Batubara (Kompas.com, 2021).

2.2 Pemberitaan Kasus Korupsi Juliari Batubara di Media

Media di Indonesia diatur untuk menjalankan fungsi kontrol sosial, salah satunya bertugas untuk memberitakan baik atau buruknya kinerja pemerintah sesuai fakta karena hal tersebut sangat penting bagi warga negara Indonesia. Dalam kasus ini berarti media memberitakan Juliari Batubara sebab Juliari saat itu merupakan menteri sosial Republik Indonesia yang mana merupakan salah satu jabatan penting dalam pemerintahan. Menurut Google Trends, kata “Juliari Batubara” mulai ramai diperbincangkan pada dari 5 Desember 2020, dan puncaknya pada 6 Desember 2020, serta mulai surut pada 19 Desember 2020. Kemudian sempat lonjakan pemberitaan kembali pada bulan Agustus 2021 ketika ada agenda persidangan untuk Juliari.

Gambar 2. 1 Tren Juliari Batubara di Internet



(Google Trends: Juliari Batubara)

Berdasarkan adanya tren pencarian Juliari Batubara, hal tersebut bersamaan dengan munculnya pemberitaan mengenai Juliari Batubara di berbagai media,

mulai dari media konvensional sampai media baru. Data “Konsumsi berita masyarakat Indonesia” menyatakan bahwa kini masyarakat Indonesia paling banyak menggunakan 3 jenis media yakni media online, televisi, dan juga surat kabar. Berikut merupakan beberapa media yang memberitakan kasus Juliari Batubara dalam kurun waktu dari OTT pada bulan Desember 2020 hingga sampai vonis pengadilan pada Agustus sampai November 2021:

No	Nama Media	Jenis Media	Tanggal	Judul Berita
1.	Detiknews	Online	5 Desember 2020	KPK OTT Pejabat Kemensos, Ini Kata Mensos Juliari
2.	Tempo	Online	5 Desember 2020	Anak Buahnya Ditangkap KPK, Mensos Juliari: Masih Kami Lihat Perkembangannya
3.	Jawapos	Online	5 Desember 2020	Respons Mensos Juliari Saat Anak Buahnya Kena OTT KPK
4.	Tirto	Online	5 Desember 2020	Mensos Juliari Sebut Pejabat yang Ditangkap KPK Eselon III Kemensos
5.	TVOne	TV	6 Desember 2020	KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Jadi Tersangka Kasus Bansos Covid-19
6.	Kompas	TV	6 Desember 2020	Juliari Batubara Didakwa Korupsi Bansos Corona Saat Jadi Menteri Sosial

7.	CNN Indonesia	Online	6 Desember 2020	KPK Tetapkan Menteri Sosial Juliari Tersangka Bansos Covid-19
8.	Indosiar	TV	6 Desember 2020	Mensos Juliari Batubara Diduga Terima Fee Rp10 Ribu per Paket Bansos
9.	Tribun Jogja	Koran	6 Desember 2020	Pejabat Kemensos Dicokok KPK
10.	Tribun Jateng	Koran	7 Desember 2020	Juliari Bisa Terancam Hukuman Mati
11.	Surya	Koran	7 Desember 2020	Juliari: Saya Akan Buat Surat Pengunduran Diri
12.	Tribun Jabar	Koran	7 Desember 2020	Tangan Menteri Juliari Diborgol
13.	Tribun Jogja	Koran	7 Desember 2020	Mensos Bisa Terjerat Hukuman Mati
14.	Kontan	Online	7 Desember 2020	Inilah jenis bansos warga miskin di kasus korupsi Mensos Juliari Batubara
15.	Kompas	TV	8 Desember 2020	Polemik Hukuman Mati di Kasus Korupsi Dana Bansos Corona
16.	IDN Times	Online	8 Desember 2020	Juliari Batubara Tidak Dijerat Pasal Hukuman Mati, Ini Alasan KPK
17.	Tribunnews	Online	9 Desember 2020	Tanggapan Soal Pidana Mati Mensos Juliari: Mahfud MD Sebut Bisa Dijerat, DPR Minta KPK Jangan Asal

18.	Tempo	Koran	9 Desember 2020	Korupsi Keji Bantuan Sosial Pandemi
19.	Republika	Online	10 Desember 2020	KPK Geledah Rumah Pribadi Mensos Juliari Batubara
20.	Kompas	Koran	11 Desember 2020	Potensi Kerugian Kasus Mensos Setara Bansos untuk 780.000 Warga Miskin
21.	Kompas	TV	11 Desember 2020	KPK Buka Kemungkinan Ancaman Hukuman Mati Pelaku Korupsi Bansos Covid-19
22.	Kompas	TV	12 Desember 2020	MAKI: Juliari Batubara Sunat Dana Bansos Rp 33 Ribu, Bukan 10 Ribu! Ini Perhitungannya
23.	Solopos	Online	12 Desember 2020	KPK Selidiki Kemungkinan Aliran Uang Suap Mensos Juliari ke PDIP
24.	Merdeka	Online	13 Desember 2020	Risma Disebut Ditawari Jokowi Jadi Mensos Gantikan Juliari Batubara
25.	Antaraneews	Online	14 Desember 2020	KPK akan dalam kerugian keuangan negara kasus suap Juliari Batubara
26.	Katadata	Online	15 Desember 2020	Jokowi Mulai Siapkan Pengganti Edhy Prabowo dan Juliari Batubara
27.	Tempo	Online	15 Desember 2020	KPK Resmi Sita Rp 14,5 Miliar dalam Kasus Bansos Covid-19

28.	Kabar24	Online	15 Desember 2020	Kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19, KPK Bakal Panggil Megawati & Hasto?
29.	Detiknews	Online	17 Desember 2020	Gandeng PPATK, KPK Telusuri Transaksi Keuangan di Kasus Bansos Corona
30.	Tribunnews	Online	17 Desember 2020	Kasus Mensos Juliari, KPK Akan Periksa Vendor Penyalur Bansos Covid-19
31.	Media Indonesia	Online	21 Desember 2020	KPK Periksa Dirjen Kemensos Terkait Korupsi Juliari
32.	Tempo	Online	21 Desember 2020	Juliari Batubara Diduga Pakai Dana Korupsi Bansos Covid-19 untuk Sewa Jet
33.	Kompas	TV	21 Desember 2020	Gibran Bantah Terlibat Pengadaan Goodie Bag Bansos
34.	Merdeka	Online	21 Desember 2020	KPK Siap Dalam Dugaan Gibran Terlibat Kasus Suap Bansos Covid-19 Menteri Juliari
35.	Pikiran Rakyat	Online	23 Desember 2020	Babak Baru Kasus Korupsi Juliari Batubara, KPK Kini Panggil Anggota Pengadaan Bansos Covid-19
36.	CNN Indonesia	TV	24 Desember 2020	Juliari Batubara: Gibran Tidak Terlibat Bansos

37.	Kompas	Online	29 Desember 2020	KPK Periksa Tersangka Pemberi Suap Juliari Batubara, Dalam Distribusi Bansos
38.	Tempo	Online	29 Desember 2020	Kasus Bansos Covid-19, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Direktur PT Bumi Pangan Digdaya
39.	Liputan6	Online	5 Januari 2021	KPK Telusuri Proses PT Tigapilar Agro Jadi Distributor Bansos Covid-19
40.	Kompas	TV	9 Januari 2021	Kasus Korupsi Bansos Covid-19, KPK Geledah Gedung Perkantoran di Kawasan Kebayoran Baru
41.	Tempo	Online	16 Februari 2021	Kasus Bansos Covid-19, Berkas Perkara Dua Penyup Juliari Batubara Dilimpahkan
42.	Tribunnews	Online	19 Februari 2021	Kasus Suap Bansos Eks Mensos Juliari Batubara, KPK Periksa Pengacara Hotma Sitompul
43.	Kompas	Online	20 Februari 2021	Ketua DPC PDI-P Kendal Kembalikan Uang Pemberian Juliari Batubara
44.	Kompas	TV	24 Februari 2021	Jaksa Sebut Juliari Batubara Menerima Rp 1,28 Miliar

45.	Kompas	TV	26 Februari 2021	KPK Periksa Ihsan Yunus dan 5 Orang Lainnya Terkait Kasus Korupsi Bansos Covid-19
46.	Kompas	Online	15 Maret 2021	Saksi Sebut Staf Ahli Juliari Batubara Beri Perintah untuk Hilangkan Alat Bukti
47.	Kompas	Online	22 Maret 2021	Jaksa KPK Hadirkan Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam Sidang Lanjutan Bansos Covid-19
48.	Tempo	Online	22 Maret 2021	Juliari Batubara Bantah Pungut Fee Rp 10 Ribu dari Paket Bansos Covid-19
49.	Liputan6	Online	22 Maret 2021	Eks Mensos Juliari Sebut Penetapan Bansos Senilai Rp 600 Ribu Atas Permintaan Presiden Jokowi
50.	Kompas	TV	21 April 2021	Sidang Dakwaan Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Mantan Mensos Juliari Batubara
51.	Kompas	Online	19 Mei 2021	Jaksa Pertanyakan Aliran Dana Ratusan Juta Rupiah dari OB Kemensos ke Rekening Sespri Juliari Batubara

52.	Liputan6	Online	24 Mei 2021	Pengacara: Tidak Ada Saksi yang Mengatakan Juliari Batubara Terima Suap
53.	Kompas	TV	25 Mei 2021	Korupsi Bansos Covid-19, Saksi: Semula Diminta Fee Rp 2.000 Tiap Paket
54.	Tempo	Online	13 Juni 2021	Warga Jabodetabek akan Gugat Juliari Batubara di Kasus Bansos Covid-19
55.	Kompas	TV	15 Juni 2021	Wakil Ketua DPRD Kendal Akui Terima Uang dari Mantan Mensos Juliari Batubara
56.	Kompas	TV	11 Agustus 2021	Heboh Terdakwa Korupsi Bansos Juliari Batubara Minta Dibebaskan, Ini Penjelasan Kuasa Hukum
57.	Kompas	TV	11 Agustus 2021	Pengacara Juliari Sebut Bukti Persidangan Tidak Kuat, KPK akan Dalami Dugaan Keterlibatan Pihak Lain
58.	Okezone	Online	13 Agustus 2021	2 Eks Anak Buah Juliari Batubara Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Bansos Covid-19
59.	TVOne	TV	23 Agustus 2021	Putusan Vonis Juliari Batubara Dibacakan Hari Ini, Apa Hasilnya?

60.	CNN Indonesia	TV	23 Agustus 2021	Juliari Divonis 12 Tahun, Pakar Hukum: Harusnya Didakwa dengan Pasal Merugikan Keuangan Negara
61.	TVOne	TV	23 Agustus 2021	Pembelaan Ditolak, Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara Korupsi Bansos
62.	Metro	TV	24 Agustus 2021	Vonis Juliari Batubara Dinilai Ringan, Mantan Hakim: Dakwaan Jaksa KPK Salah
63.	Surya	Koran	24 Agustus 2021	Hakim Sebut Eks Mesos Tak Kesatria
64.	Kompas	TV	2 September 2021	Korupsi Bansos, Adi Wahyono Divonis 7 Tahun Penjara
65.	Detiknews	Online	23 September 2021	Juliari Batubara Dieksekusi ke Lapas Tangerang yang Baru Kebakaran
66.	Tempo	Online	29 September 2021	KPK Eksekusi Anak Buah Juliari Batubara ke Lapas Sukamiskin
67.	Antara	Online	26 Oktober 2021	KPK Masih Kembangkan Kasus Korupsi Bansos
68.	Pikiran Rakyat	Online	5 November 2021	Kasus Juliari Batubara 'Hilang', Novel Baswedan Minta KPK Tuntaskan Jangan Seolah-olah Selesai

2.3 Gambaran Umum PDI-Perjuangan

2.3.1 Sejarah PDI-Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Bakal lahirnya PDI-Perjuangan diawali dengan berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI) oleh Ir Soekarno pada 4 Juli 1927 sebagai respons dari adanya Maklumat 3 November 1945 yang mengarahkan pembentukan partai-partai politik. Namun pada Pemilu 1977 era Orde Baru, MPR membuat peraturan yang memerintahkan agar partai-partai sejenis digabungkan. Pertama, partai-partai beraliran Islam melebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PNI pun mengalami fusi dengan partai-partai kecil seperti Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Gabungan PNI dengan partai beraliran nasionalis dan juga partai nonIslam melahirkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973 (Pribadi, 2014).

Pada saat itu PDI tidak memiliki suara Pemilu sebanyak sekarang, bahkan dulu suara yang didapat tidak sampai 10%. Namun pada pemilu ketiga yakni tahun 1987, PDI berhasil mencapai 10% suara pertamanya in karena sebelumnya Soerjadi selaku ketua PDI menarik Megawati dan Guruh anak Soekarno ke dalam PDI dengan harapan agar suara yang didapat pada Pemilu selanjutnya akan meningkat dan hal itu terbukti berhasil. Namun, pemerintahan Orde Baru tidak menyukai hal itu.

Selanjutnya dalam tubuh PDI mulai timbul perpecahan. Pada tahun 1993, Megawati ditunjuk menjadi Ketua Umum PDI periode 1993 sampai 1998 karena DPC dan 100 orang lainnya setuju. Di tahun 1996, pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri dan ABRI meminta PDI menandatangani Kongres Luar Biasa (KLB) Medan yang menetapkan Soerjadi sebagai Ketua PDI. Namun, acara itu tidak dihadiri oleh Megawati selaku Ketua PDI versi Munas Jakarta. Hal tersebut menunjukkan adanya dualisme kepemimpinan. Konflik dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia kian nyata karena kemudian berlanjut pada tragedi Kuda Tuli (Kerusuhan 27 Juli 1996) dimana pendukung Megawati dan pendukung Soerjadi bentrok yang mengakibatkan 5 orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Peristiwa berdarah itu membuat PDI mengubah namanya menjadi PDI-Perjuangan dan merupakan awal mula ketenaran Megawati dan bagaimana PDIP bisa sebesar sekarang (Prinada, 2021).

2.3.2 Visi dan Misi PDI-Perjuangan

➤ Visi

Visi merupakan hal yang dicita-citakan partai berisi tujuan yang hendak dicapai. Beberapa visi PDIP menurut AD/ART Pasal 6 antara lain:

1. Membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;

2. Melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
3. Menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
4. Sebagai wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara
5. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

➤ Misi

Misi merupakan nilai yang menunjukkan bahwa partai tersebut ada.

Menurut Pasal 9 AD/ART, PDI Perjuangan memiliki fungsi:

1. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
2. Melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, Lembaga-Lembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;
3. Membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan

ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

4. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
5. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila;
6. Membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Sementara itu pada Pasal 10 AD/ART, PDIP memiliki tugas:

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;
3. Menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan

TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;

5. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
6. Mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
7. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa; s
8. Sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme (PDI-Perjuangan, 2021).

2.3.3 Lambang PDI-Perjuangan

Gambar 2. 2 Lambang PDIP



(MasVian, 2021)

PDI-Perjuangan dikenal memiliki logo yang khas dimana ada gambar banteng dengan latar belakang berwarna merah. Filosofi logo tersebut di antaranya, warna merah yang merepresentasikan keberanian untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran demi rakyat, kemudian mata banteng yang merah melambangkan PDIP siap siaga dalam perjuangannya, selanjutnya moncong putih diartikan sebagai PDIP sebagai pejuang kebenaran dan keadilan senantiasa dapat dipercaya.

2.4 Catatan Kasus Korupsi Kader PDI-Perjuangan 5 Tahun Terakhir

- 1) Damayanti Wisnu Putranti – Anggota Komisi V DPR RI (2016)

Terlibat dalam penerimaan suap proyek pelebaran jalan Tehoru-Laimu Maluku, senilai Rp8,1 miliar dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama. Damayanti pun itu pun divonis 4,5 tahun penjara.

- 2) Ojang Sohandi – Bupati Subang (2016)

Ojang dipenjara selama 8 tahun karena korupsi BPJS dan menerima uang dari berbagai dinas untuk keperluan pribadinya.

3) Bambang Kurniawan – Bupati Tanggamus (2016)

Terlibat dalam kasus gratifikasi yang diberikan pada DPRD Tanggamus senilai Rp943 juta terkait pengesahan APBD 2016, sehingga Bambang dipenjara 2 tahun lamanya.

4) Taufiqurrahman – Bupati Nganjuk (2017)

Terbukti melakukan gratifikasi sejumlah Rp25 miliar dan pencucian uang Rp 9 miliar sehingga didakwa 4 tahun penjara.

5) Sri Hartini – Bupati Klaten (2017)

Sri Hartini didakwa 11 tahun penjara karena telah memperjualbelikan jabatan di area Pemkab Klaten.

6) Arief Wicaksono – Ketua DPRD Kota Malang (2018)

Melakukan pelanggaran korupsi yaitu suap APBD-P Kota Malang dan penganggaran kembali Jembatan Kedungkandang. Oleh karenanya, mendapatkan hukuman 5 tahun penjara.

7) Cipto Waluyo – Ketua DPRD Kebumen (2018)

Cipto dipenjara karena menerima sejumlah uang dari Sekda Kebumen terkait dengan pengesahan APBD Kab Kebumen, ini menyebabkan Cipto dipenjara 4,5 tahun.

8) Samanhudi Anwar – Wali Kota Blitar (2018)

Telah menerima suap ijon proyek sekolah lanjutan pertama sebesar Rp1,5 miliar sehingga dihukum 5 tahun penjara.

9) Tasdi – Bupati Purbalingga (2018)

Menerima suap proyek Islamic Center dan gratifikasi dari berbagai pihak, sehingga dijatuhi hukuman penjara 7 tahun.

10) Sunjaya Purwadisastra – Bupati Cirebon (2018)

Menjadi tersangka atas kasus jual beli jabatan dan menerima suap sehingga divonis hukuman penjara 5 tahun.

11) Pangonal Harahap – Bupati Labuhanbatu (2018)

Pangonal Harahap menjadi tersangka karena telah menerima hadiah dengan jumlah sangat besar yaitu Rp 42,28 miliar dan SGD 218.000 dari pengusaha. Ini menyebabkan Pangonal mendapatkan 8 tahun penjara.

12) Syahri Mulyo – Bupati Tulungagung (2018)

Telah beberapa kali menerima suap hingga Rp2,5 miliar dari kontraktor proyek pembangunan jalan, ini membuat Syahri Mulyo divonis 10 tahun penjara.

13) Supriyono – Ketua DPRD Tulungagung (2018)

Diduga telah menerima sebesar Rp4,88 miliar pada pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015–2018. Akibatnya, mendapat hukuman penjara 8 tahun.

14) Abu Bakar – Bupati Bandung Barat (2018)

Melakukan tindakan gratifikasi untuk pencalonan istrinya pada pencalonan bupati periode tahun 2018 sampai 2023, akibatnya Abu Bakar harus dijatuhi hukuman 5,5 tahun penjara.

15) Agus Feisal Hidayat – Bupati Buton Selatan (2018)

Agus telah menerima suap dari pengusaha Tony Kongres alias Acucu dan Simon Liong alias Cencen sebesar Rp578 juta karena telah diberikan jatah proyek, sehingga Agus pun dihukum 10 tahun penjara.

16) Supian Hadi – Bupati Kotawaringin Timur (2019)

Supian menyalahgunakan wewenangnya dengan menerima suap pemberian izin usaha pertambangan di Kotawaringin Timur. Beberapa usaha tambang yang memberi suap antara lain PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia dan PT Aries Iron Mining. Negara ditaksir rugi hingga Rp8,5 triliun.

17) Nyoman Dhamantra – Anggota DPR I (2019)

Nyoman menerima suap dari Direktur PT Cahaya Sakti Argo (CSA) Chandry Suanda alias Afung senilai Rp3,5 miliar agar dimudahkan dalam pengurusan impor bawang putih. Akibatnya, Nyoman divonis 7 tahun penjara.

18) Harun Masiku – Eks Caleg PDIP (2020)

Sempat tertangkap pada OTT KPK 2020 dimana Harun diduga telah menyuap komisioner KPU agar dapat menjadi anggota DPR RI. Namun hingga kini, masih menjadi buronan.

19) Wenny Bukamo – Bupati Banggai Laut (2020)

Terlibat dalam kasus suap pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkab Banggai Laut. Wenny memperoleh uang Rp2,2 miliar dari pengusaha yang bersangkutan. Akibatnya, ia divonis hukuman penjara selama 4,5 tahun.

20) Ajay Muhammad Priatna – Wali Kota Cimahi (2020)

Terbukti menerima hadiah dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda dari komisioner sebesar Rp1,88 miliar, sehingga mendapat hukuman 2 tahun penjara.

21) Juliari Batubara – Menteri Sosial (2020)

Divonis 12 tahun penjara karena telah melakukan penyelewengan pada program pengadaan Bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek. Ia menerima suap sebesar Rp32,4 miliar dari perusahaan rekanan bansos.

22) Nurdin Abdullah – Gubernur Sulawesi Selatan (2021)

Diduga telah menerima uang dari kontraktor proyek infrastruktur sebesar Rp5,4 miliar, sehingga didakwa 5 tahun penjara.

2.5 Kejayaan PDI-Perjuangan di Jawa Tengah

Sebutan “kandang banteng” menjadi tanda bahwa PDIP merupakan partai yang mendominasi di Jawa Tengah. Bahkan masyarakat Jawa Tengah setuju untuk mengidentifikasi diri sendiri dengan PDIP. Kekuatan PDIP dapat dibuktikan dengan melihat data perolehan suara PDIP pada pemilihan dan jumlah kepala daerah usungan PDIP. Pemilihan presiden 2014, pasangan Jokowi-JK berhasil meraih 66,65% suara, lebih unggul daripada rivalnya Prabowo-Hatta yang hanya meraih 33,35%. Jokowi merupakan kandidat yang mewakili PDI-Perjuangan. Pada pemilu legislatif 2014, Jawa Tengah menjadi provinsi yang menyumbang suara terbanyak bagi kemenangan PDIP dengan 4.295.598 suara, dengan demikian PDIP pun memenangkan pileg 2014 di Jawa

Tengah. PDIP mendapatkan 31 kursi dari 100 kursi di DPRD Jawa Tengah. Dalam politik tingkat daerah kabupaten atau kota, terdapat 17 dari 35 kabupaten/kota yang dipimpin oleh aktor politik dari PDIP. Kabupaten/kota tersebut di antaranya Kota Semarang, Kabupaten Boyolali, Kota Solo, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, dan sebagainya. Pada 2014 lalu, Jawa Tengah sendiri sudah sekitar satu tahun di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo yang juga berasal dari PDIP.

Selanjutnya, pada pilgub 2018 Ganjar Pranowo dipilih kembali untuk menjalankan kepemimpinannya di Jawa Tengah setelah mendapatkan sejumlah 58,78% suara. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, Ganjar hanya kalah pada 4 daerah yaitu Purbalingga, Tegal, Brebes, dan Kebumen. Jokowi pun kembali terpilih menjadi presiden Republik Indonesia pada pilpres 2019. Di Jawa Tengah, pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 16.784.716 suara, lawan terpaut jauh dengan hanya mendapat 4.944.447 suara. Pada pileg 2019 PDIP meraih 26 kursi dari total 77 kursi DPR RI. PDIP pun meraih 42 kursi, dari total kuota 120 kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, 28 dari 35 pimpinan DPRD kabupaten/kota di Jawa Tengah merupakan kader PDIP. DPRD provinsi pun diketuai oleh kader PDIP. Di pilkada akhir tahun 2020 lalu, kepala daerah terpilih usungan PDIP adalah sebanyak 17 orang. Sehingga, hingga kini terdapat 22 dari 35 bupati/ walikota di Jawa Tengah yang berasal dari PDI-Perjuangan.

2.6 Kinerja Aktor PDIP di Pemerintahan dalam Mengatasi Permasalahan

Dasar

2.6.1 Masalah Ekonomi

Seperti yang kita tahu bahwa presiden RI adalah kader PDI-Perjuangan. Dalam bab ekonomi, periode pertama Jokowi stabil. Meski belum mencapai target 7%, dan kenyataannya hanya berkisar 4,88% hingga 5,17%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama pada tahun 2018 sebesar 5,17% merupakan tiga terbesar setelah India dan Cina. Perbandingan warga miskin mengalami penurunan. Pada awal kepemimpinan sejumlah 10,96 persen dan di tahun 2018 menjadi 9,66%. Tingkat inflasi pun saat itu menjadi yang terendah pada sejarah Indonesia, daya beli masyarakat terjaga. Begitu pula dengan angka ketimpangan yang turun berangsur-angsur. Pada periode kedua, kurun waktu April hingga Juni 2021 ekonomi Indonesia tumbuh 7,07% setelah pada awal pandemi merosot 5,32%. Jokowi melakukan usaha pemulihan ekonomi pada masa pandemi dengan realokasi dan re-focussing anggaran, di antaranya untuk kepentingan bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

Sementara, provinsi Jawa Tengah pada bidang ekonomi berhasil meraih tiga kali penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) saat kepemimpinan Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDIP. Keberhasilan Jateng tidak lepas dari keberadaan sebuah inovasi bernama aplikasi Sistem Informasi Harga Produksi Komoditi (Sihati) yang berfungsi memantau harga dan produksi komoditas. Dengan adanya aplikasi tersebut, pergerakan harga komoditas

maupun produksi komoditas terpantau lebih cepat. Namun di Jawa Tengah, isu ekonomi seputar kemiskinan masih menjadi sorotan di mana menurut survei Katadata, Jawa Tengah masuk dalam 3 besar provinsi dengan warga miskin terbanyak nasional.

2.6.2 Masalah Pendidikan

Menurut penilaian Programme for International Student Assessment (PISA), kompetensi membaca, matematika, dan sains siswa Indonesia masih berada di urutan bawah dan stagnan dalam 10 - 15 tahun terakhir, namun pada 2018 justru terjadi penurunan skor per subtes. Angka siswa yang berprestasi rendah diiringi angka anak yang tinggal kelas tinggi yakni sejumlah 16% di mana lebih tinggi 5% dari negara-negara lain. Ini menunjukkan bahwa terdapat rendahnya mutu pendidikan dan ketidakmerataan akses pendidikan sehingga ujian-ujian dasar bagi siswa pun masih belum mencapai nilai rata-rata dunia. Pencapaian dalam bidang pendidikan ketika dipimpin oleh kader PDI Perjuangan adalah sukses mengurangi persentase masyarakat buta aksara menjadi 1,71%, menginisiasi program merdeka belajar untuk memutuskan rantai proses belajar yang monoton, adanya program KIP yang menyoal masyarakat miskin dan rentan miskin agar tetap dapat sekolah bahkan sampai level pendidikan tinggi.

Pada tingkat provinsi, hanya 2,9% APBD di Jawa Tengah yang dialokasikan untuk menangani masalah pendidikan, jauh di bawah DKI Jakarta yang berada di angka 22%. Rata-rata mengenyam pendidikan adalah selama delapan tahun. Jumlah penduduk yang berpendidikan masih sedikit

dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak berpendidikan. Aktivitas literasi pun cukup rendah karena hanya berangka 33,3 di bawah rata-rata nasional. Meski demikian terdapat salah satu prestasi dalam bidang pendidikan ketika Jawa Tengah dipimpin oleh kader PDIP yakni dimana kualitas SMA di Jateng termasuk baik dibuktikan dengan menjadi provinsi terbanyak yang mampu masuk ke dalam daftar Top 1.000 LTMPT 2021 dilihat dari nilai UTBK pada tahun 2021 lalu, tepatnya ada 211 sekolah.

2.6.3 Masalah Kesehatan

Indonesia masuk ke dalam peringkat 4 besar kasus stunting tertinggi dunia, namun lambat laun jumlahnya menurun di Indonesia. Saat ini, ada satu dari empat balita di Indonesia yang memiliki gizi buruk. Begitu pula dengan kasus TBC di Indonesia yang masuk menjadi 3 besar negara darurat TBC menurut Kemenkes. Kemudian, 20% dari 250 juta masyarakat Indonesia memiliki potensi atas gangguan kesehatan mental. Namun, tidak semua orang dengan penyakit mental menerima perawatan yang tepat karena tidak semua provinsi memiliki klinik psikiatri. Di sisi lain, Indonesia memiliki prestasi dalam kesehatan seperti menjadi negara dengan pengendalian COVID-19 terbaik dunia, yang mampu menurunkan hingga 58% dalam waktu dua minggu melalui Satgas COVID-19.

Sementara, dalam bidang kesehatan, Jawa Tengah masuk ke dalam 5 besar indeks kesehatan tertinggi. Jawa Tengah berhasil juga dalam menekan penyebaran COVID-19 melalui Jogo Tonggo sehingga tingkat kesembuhan tinggi. Keberhasilan pengobatan pasien TBC pun masuk 12 tertinggi. Namun,

saat ini Jateng masih memiliki masalah prioritas kesehatan yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), AKN, stunting, penyakit menular - tidak menular, serta mutu dan cakupan imunisasi.

2.6.4 Masalah Hukum dan HAM

Pada bidang Hukum dan HAM, Indonesia masih banyak masalah yang belum bisa ditangani. Menurut Amnesty Internasional Indonesia, penegakan HAM semakin buruk karena Indonesia tidak kunjung berkomitmen secara serius dalam upaya penegakan HAM. Intoleransi masih sangat sering ditemui, agama minoritas kerap mendapatkan intimidasi, akses ke Papua dibatasi bagi pers luar negeri, rekonsiliasi yang dijanjikan untuk pembantaian 1965-1966 belum menemui kejelasan, aparat yang represif dan menggunakan kekerasan saat mengkondisikan massa ketika ada kerumunan. Ada juga pengesahan UU Cipta Kerja yang jika ditinjau dari segi kemanusiaan dapat berpotensi pada eksploitasi pekerja dan hal-hal lain yang memang tidak sesuai dengan standar HAM internasional. Ketidakadilan hukum juga masih dipertanyakan. Orang-orang biasa umumnya ketika mendapati masalah dan menemui polisi, hanya berakhir di acara pelaporan, tidak ada tindakan sehingga baru-baru ini muncul tagar #PercumaLaporPolisi. Belum lagi, jika ada kesalahan yang dilakukan masyarakat yang kekurangan uang, polisi tidak segan-segan langsung memasukkan orang tersebut ke penjara, namun jika yang bersangkutan cenderung mapan secara ekonomi, waktu pemrosesan hukum cenderung lebih cepat. Di Jawa Tengah, masalah penegakan hukum dan HAM juga belum membaik. Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan tingkat aduan

masyarakat cukup tinggi, di antaranya terdapat 13 aduan seputar agraria dan 18 aduan terkait intoleransi menurut Komnas HAM.